



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELUANG MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI TENGAH EL NINO

Sri Nurhayati Qodriyatun

Analisis Legislatif Ahli Madya

sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak awal tahun 2023, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan bahwa Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih parah sebagai dampak dari fenomena El Nino. Pada beberapa wilayah, khususnya pada bulan Agustus – September – Oktober, diperkirakan curah hujannya akan berada pada kategori rendah, dengan rentang antara 0-100 mm per bulan. Dampak yang ditimbulkan adalah gagal panen pada sejumlah lahan pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang dipicu oleh El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan pada 870.000 hektar lahan di berbagai wilayah Indonesia. Lebih lanjut, Mentan juga mengungkapkan bahwa El Nino dengan intensitas yang kuat dapat mengurangi produksi beras hingga sekitar 1,2 juta ton. Pemerintah melakukan upaya antisipasi melalui Gerakan Nasional (Gernas) penanganan El Nino, dengan 7 kegiatan utama yaitu koordinasi pelaksanaan penanganan dampak El Nino; pendataan, pemetaan, dan persiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL); penyediaan sumber pengairan; distribusi benih; distribusi pupuk; gerakan tanam, gerakan penanganan kekeringan; serta pengawalan asuransi dan pembiayaan.

Gernas penanganan El Nino dilaksanakan selama periode Agustus – Oktober 2023 dengan target lahan seluas 500 hektar yang tersebar di 6 provinsi utama dan 4 provinsi pendukung. Keenam provinsi utama tersebut adalah Sumatera Utara (13 kabupaten dengan luas lahan 45.000 ha), Sumatera Selatan (10 kabupaten dengan luas lahan 74.500 ha), Jawa Barat (6 kabupaten dengan luas lahan 39.500 ha), Jawa Tengah (22 kabupaten dengan luas lahan 6.000 ha), Jawa Timur (22 kabupaten dengan luas lahan 59.000 ha), dan di Sulawesi Selatan (11 kabupaten dengan luas lahan 81.000 ha). Adapun provinsi pendukung Gernas adalah Lampung (6 kabupaten dengan lahan 36.000 ha), Banten (4 kabupaten dengan lahan 16.000 ha), Kalimantan Selatan (9 kabupaten dengan lahan 51.000 ha), dan Nusa Tenggara Barat (5 kabupaten dengan lahan 12.000 ha).

Selain Gernas, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam sektor pertanian. Upaya ini mencakup identifikasi dan pemetaan lokasi yang akan terdampak kekeringan; percepatan penanaman untuk mengejar sisa hujan; peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan); peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti embung, parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, dan pompanisasi. Kementan juga berupaya menyediakan bibit benih yang tahan terhadap kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino dengan alokasi 1.000 hektar per kabupaten juga turut dilaksanakan. Pengembangan pupuk organik yang terpusat dan mandiri, dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian, serta penyiapan lumbung pangan hingga tingkat desa menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan El Nino.

Upaya pemerintah tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam lima tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan memang terus meningkat. Di tahun 2020 anggaran ketahanan pangan adalah Rp74,5 triliun, tahun 2021 sebesar Rp85,9 triliun, tahun 2022 sebesar RpRp88,8 triliun, tahun 2023 sebesar Rp100,9 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp108,8 triliun. Akan tetapi, sepertinya upaya membangun ketahanan pangan melalui Gernas masih jauh dari harapan. Nyatanya harga bahan pangan, terutama beras, masih saja terus naik hingga awal September ini. Perlu ada upaya lain dalam menghadapi El Nino di tahun ini karena pengendalian harga pangan masih menjadi kunci bagi pengendalian inflasi di Indonesia. Upaya tersebut, antara lain, *pertama*, perlu ada dana penanganan inflasi pangan. Dana tersebut sebaiknya diarahkan untuk peningkatan produksi pangan sehingga nantinya ketersediaan pangan akan berkelanjutan. *Kedua*, peningkatan produktivitas pertanian pangan, terutama komoditas pangan yang paling banyak menyumbang inflasi. *Ketiga*, dengan diversifikasi pangan, terutama diversifikasi pangan pokok masyarakat Indonesia. Pangan pokok masyarakat dapat diarahkan ke selain beras, seperti jagung, kentang, ubi-ubian, dan lain-lain.

Atensi DPR

Kekeringan karena El Nino sangat berdampak terhadap ketahanan pangan kita. Upaya membangun ketahanan pangan melalui Gerakan Nasional Penanganan El Nino memerlukan dana yang cukup besar. Tidak hanya itu, koordinasi dengan berbagai sektor juga perlu dilakukan. Juga kesiapan infrastruktur seperti embung, sumur, jaringan irigasi, kesemuanya itu memerlukan dana yang cukup besar. Belum lagi partisipasi petani sangat dibutuhkan. Agar anggaran ketahanan pangan dalam APBN digunakan secara optimal dan tepat sasaran, maka Komisi IV DPR RI melalui pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana penanganan inflasi pangan dari anggaran ketahanan pangan. Selain itu, juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan yang menyumbang inflasi dan untuk melakukan diversifikasi pangan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 29 dan 31 Agustus 2023;
Kompas, 29 Agustus 2023; dan
Kontan, 31 Agustus 2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023